



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V

**PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
TRANSFER KE DAERAH	784.945.321.424.000
I. Dana Perimbangan	747.196.825.424.000
A. Dana Transfer Umum	544.670.877.029.000
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	117.580.294.554.000
a. DBH Pajak	56.231.028.325.000
i. Pajak Penghasilan	35.069.544.200.000
ii. PBB	17.698.572.125.000
iii. Cukai Hasil Tembakau	3.462.912.000.000
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	48.844.766.229.000
i. Minyak Bumi dan Gas Bumi	24.309.374.100.000
ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	20.967.275.588.000
iii. Kehutanan	1.890.514.908.000
iv. Perikanan	720.283.388.000
v. Panas Bumi	957.318.245.000
c. Kurang Bayar (KB) DBH	12.504.500.000.000
1. KB DBH Pajak	1.938.197.500.000
2. KB DBH SDA	10.566.302.500.000
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.090.582.475.000
a. DAU Murni Formula	418.707.900.000.000
b. DAU Tambahan	8.382.682.475.000
1. Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000.000
2. Dukungan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	4.260.552.540.000
3. Dukungan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.122.129.935.000
B. Dana Transfer Khusus	202.525.948.395.000
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	72.249.800.000.000
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130.276.148.395.000
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.315.611.400.000
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.477.200.000.000
d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.836.281.140.000
e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	698.325.855.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus	2.063.730.000.000
g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	141.700.000.000
h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB)	11.676.000.000.000
i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	200.000.000.000
j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.001.310.000.000
k. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	284.300.000.000
l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	106.190.000.000
II. Dana Insentif Daerah	15.000.000.000.000
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	22.748.496.000.000
A. Dana Otonomi Khusus	21.428.496.000.000
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	8.374.158.000.000
a. Provinsi Papua	5.861.910.600.000
b. Provinsi Papua Barat	2.512.247.400.000
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.374.158.000.000
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.680.180.000.000
a. Provinsi Papua	2.853.973.764.000
b. Provinsi Papua Barat	1.826.206.236.000
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.320.000.000.000
DANA DESA	72.000.000.000.000
J U M L A H	856.945.321.424.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman